

## HUBUNGAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA, PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2011-2020

**Pramodya Hanggarany**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
pramodyahangga17@gmail.com

### Abstrak

Riset ini bermaksud menganalisa akibat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, serta konsumsi pemerintah serta pajak wilayah kepada indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Tulungagung tahun 2011- 2020. Penerangan pada pada riset ini ialah informasi inferior yang berawal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah serta pajak wilayah di Kabupaten Tulungagung. Riset ini memakai cara kuantitatif dengan metode analisa informasi yang dipakai merupakan regresi linier berganda memakai SPSS 23. Hasil riset ini membuktikan kalau: (1) pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga mempengaruhi positif kepada indikator pembangunan orang di Kabupaten Tulungagung (2) pengeluaran mengkonsumsi penguasa tidak mempengaruhi positif kepada indikator pembangunan orang di Kabupaten Tulungagung (3) pajak wilayah tidak mempengaruhi positif kepada indikator pembangunan orang di Kabupaten Tulungagung (4) pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga, pengeluaran mengkonsumsi penguasa serta pajak wilayah berpengaruh positif kepada indikator pembangunan orang di Kabupaten Tulungagung tahun 2011- 2020.

**Kata Kunci:** Konsumsi, Rumah Tangga, Pemerintah, Pajak, IPM.

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sesuatu wilayah bermaksud buat menaikkan keselamatan orang. Warga ialah pelakon penting pada penerapan aktivitas pembangunan, alhasil kedudukan warga amat diperlukan pada pembangunan buat menaikkan keselamatan. Keselamatan bisa diukur dari mutu pembangunan manusianya.<sup>1</sup>

Pada prakteknya, kerap ditemukan kalau sesuatu wilayah dengan perkembangan ekonomi yang besar namun mutu pembangunan manusianya yang sedang terhitung kecil.

Perkembangan ekonomi sepatutnya mempengaruhi dalam kenaikan pemasukan, pemasukan wajib lebih banyak buat bayaran pendidikan serta Kesehatan. Oleh sebab itu, tantangan pembangunan yang sangat penting merupakan kenaikan mutu hidup. Mutu hidup yang bagus tidak cuma tergantung dalam pemasukan yang besar, namun pula dalam pendidikan serta kesehatan yang lebih bagus, pengentasan kekurangan, pemerataan peluang kegiatan serta situasi area yang bagus supaya

<sup>1</sup> Abu Bakar, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika"

dalam <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnalkritis/article/view/111>, diakses 10 November 2022

bisa hidup pantas, alhasil bisa menaikkan mutu pembangunan orang.<sup>2</sup>

Pemerintah membuat bermacam berbagai skala pembangunan orang, tetapi tidak seluruhnya bisa dipakai selaku standar yang bisa dipakai selaku pembeda dampingi area. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (PPPBB) dalam tahun 1990 memutuskan sesuatu skala standar ialah Indikator Pembangunan Orang (IPM) selaku perlengkapan buat mengukur kesuksesan pembangunan orang. Menurut Tubuh Pusat Statistik (BPS) Indikator Pembangunan Orang (IPM) ialah sesuatu indikator yang dipakai buat mengukur pendapatan pembangunan orang berplatform beberapa bagian bawah mutu hidup.<sup>3</sup>

IPM terdiri dari 3 format ialah pemasukan, pendidikan, serta kesehatan. Ketiga pandangan itu ialah aspek yang sangat besar pengaruhnya kepada IPM. Terus menjadi besar tingkatan pendidikan warga, terus menjadi gampang untuk warga buat memperoleh profesi serta pemasukan yang lebih bagus, alhasil lebih segar. Tingkatan kesehatan warga yang kecil membuahkan daya produksi yang kecil pula, daya produksi yang kecil pula bisa menyebabkan pemasukan yang kecil. Tingkatan pemasukan yang kecil itu menimbulkan minimnya akses kepada Pendidikan serta Kesehatan sebab hambatan bayaran. Bila perihal ini terjalin sehingga dikemudian hari hendak terjalin akibat rendahnya mutu pembangunan orang. Keberhasilan pengembangan pemerintah wajib sanggup membenarkan ketiga format itu. Jadi dibutuhkan upaya yang amat besar buat menggapai misi penerapan pembangunan ekonomi wilayah itu.

Pemerintah mempunyai kedudukan berarti kepada besar ataupun rendahnya angka Indikator Pembangunan Orang (IPM). Kedudukan itu

merupakan melewati Kebijakan Pajak, Kebijakan Pajak ialah kebijakan dari pemerintah buat mempengaruhi perekonomian negeri melewati kebijakan pendapatan semacam pajak wilayah serta pengeluaran pemerintah, pergerakan sumberdaya serta harga benda ataupun pelayanan. Pajak wilayah ialah salah satu kebijakan pajak yang terbuat pemerintah, tercantum Kabupaten Tulungagung. Dari informasi BPS Kabupaten Tulungagung, Pajak Wilayah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2011- 2020 beranjak labil. Sebaliknya dari 2017- 2020 hadapi penyusutan. Kenaikan sangat besar terjalin dalam tahun 2016- 2017 ialah sebesar 21, 97 Persen, hasil itu ialah beda dari 131, 90 Persen serta 109, 93 Persen. Sebaliknya penyusutan sangat ekstrem terjalin dalam tahun 2019- 2020 ialah sebesar 15, 05 Persen. Perihal itu disebabkan terdapatnya endemi covid- 19 yang terjalin di bumi serta Pajak Wilayah di Tulungagung turut hadapi akibatnya. Pajak wilayah Kabupaten Tulungagung terendah terjalin dalam tahun 2020 ialah sebesar 96. 78 Persen, sebaliknya pajak yang paling tinggi terjalin dalam tahun 2011 ialah sebesar 143. 70 Persen.

Besar kecilnya pada meningkatkan negeri bisa dikenal dari peruntukan perhitungan pemerintah yang dikeluarkan buat kenaikan pembangunan orang. Peruntukan perhitungan yang besar bisa buat menaikkan bagian- bagian dari pembangunan orang disuatu negeri. Oleh sebab itu bisa dibilang besarnya peruntukan berbelanja pemerintah berhubungan dengan perkembangan IPM negeri. Pengeluaran mengkonsumsi (berbelanja) pemerintah ialah salah satu wujud berbelanja pemerintah buat menaikkan keselamatan warga.

Pengeluaran Mengkonsumsi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2011 – 2020

<sup>2</sup> Helmi Noviansyah, dkk., “Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Dalam Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Kalimantan Barat”, dalam

<https://jurnal.untan.ac.id/php/JEDA2/article/view/28580>, diakses 30 November 2022

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik (BPS)

pula beranjak labil. Pengeluaran Mengonsumsi Pemerintah paling tinggi terjalin dalam tahun 2011 ialah sebesar 12, 19 Persen. Sebaliknya Pengeluaran Mengonsumsi Pemerintah terendah terjalin dalam tahun 2014 ialah sebesar 1, 23 Persen. Penyusutan mengonsumsi pemerintah itu diakibatkan oleh penyusutan berbelanja benda serta pelayanan melewati anggaran pemasukan serta berbelanja negeri.

Tidak hanya kedudukan pemerintah, warga pula pengaruhi kepada pergantian IPM. Kedudukan warga pada menaikkan angka Indikator Pembangunan Orang merupakan dengan membuka upaya serta menaikkan energi beli (mengonsumsi) warga tiap hari. Bila pengeluaran mengonsumsi warga bertambah sehingga angka IPM pula hendak bertambah pula. Bersumber pada informasi dari Tubuh Pusat Statistik (BPS), pengeluaran mengonsumsi rumah tangga di Kabupaten Tulungagung paling tinggi terjalin dalam tahun 2011 ialah sebesar 6, 52 Persen. Dari tahun 2011- 2013 pengeluaran mengonsumsi rumah tangga di kabupaten Tulungagung lalu hadapi penyusutan. Hadapi kenaikan lagi ialah dalam tahun 2014, namun kenaikan itu tidak sangat besar, ialah cuma senilai 0, 14 Persen saja dari beda dalam tahun 2014 sebesar 4, 45 Persen serta 2013 sebesar 4, 31 Persen. Setelah itu dari 2015- 2020 pengeluaran mengonsumsi rumah tangga di kabupaten Tulungagung lalu hadapi naik turun. Penyusutan sangat akut terjalin dalam 2020 ialah sebesar 0, 86 Persen.

BPS berkata aspek pemicu melambatnya perkembangan mengonsumsi rumah tangga karena warga menengah ke atas menahan konsumsinya. Penyusutan itu searah dengan melambatnya perkembangan pabrik santapan serta minuman. BI pula menulis kalau pelanggan mengarah menahan mengonsumsi serta menaikkan dana. Rumah tangga bisa jadi menahan mengonsumsi, semacam yang didikatan oleh BPS ataupun BI. Tetapi, kita sedang wajib menyambut anggapan lain,

semacam penyusutan ini menunjukkan eskalasi bayaran hidup serta penyusutan angka ubah rupiah. Tidak hanya itu, eskalasi harga tidak cocok dengan eskalasi imbalan. Rendahnya perkembangan ekonomi itu salah satunya diakibatkan oleh melambatnya perkembangan mengonsumsi rumah tangga. Selaku donor terbanyak kepada perekonomian, mengonsumsi rumah tangga jadi penanda referensi buat mengukur perekonomian dengan cara totalitas. Gaya perkembangan mengonsumsi senantiasa berbarengan dengan laju perekonomian. Kala mengonsumsi melambat, nyaris tentu berakibat dalam perkembangan ekonomi dengan cara totalitas.

Kabupaten Tulungagung dalam tahun 2011-2020 hadapi eskalasi indikator pembangunan orang yang lumayan penting. Dari 10 tahun itu eskalasi menggapai 5, 24 Persen, ialah dari informasi indikator pembangunan orang terendah yang terjalin dalam tahun 2011 sebesar 67, 76 Persen serta informasi indikator pembangunan orang paling tinggi dalam 2020 sebesar 73 Persen. dengan perkembangan ekonomi yang semakin meluas dari tahun ke tahun serta pesanan produksi yang bertambah. Pembangunan orang bisa ditingkatkan, serta indikator perkembangan orang bisa ditingkatkan pula. Kenaikan Indikator Pembangunan Orang Kabupaten Tulungagung tidak terbebas dari terdapatnya faktor- faktor itu yang mempengaruhinya. Sebagian aspek yang pengaruhi IPM merupakan pengeluaran mengonsumsi rumah tangga serta pengeluaran mengonsumsi pemerintah serta pajak wilayah.

Bersumber pada penjelasan kerangka balik di atas, periset terpikat buat melaksanakan riset dengan kepala karangan: “Akibat Pengeluaran Mengonsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Mengonsumsi Pemerintah serta Pajak Wilayah kepada Indikator Pembangunan Orang di Kabupaten Tulungagung tahun 2011- 2020”. Riset ini bermaksud buat mencoba serta

menganalisa signifikansi akibat pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga, pengeluaran mengkonsumsi pemerintah serta pajak wilayah dengan cara parsial kepada Indikator Pembangunan Orang Kabupaten Tulungagung, dan buat mencoba serta menganalisa signifikansi akibat pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga, pengeluaran mengkonsumsi pemerintah serta pajak wilayah dengan cara simultan kepada Indikator Pembangunan Orang Kabupaten Tulungagung.

### **METODE PENELITIAN**

Aspek yang dipakai pada riset ini timbul dari aspek terbatas serta aspek bebas (leluasa). Variabel terbatas merupakan jenis aspek yang dipaparkan oleh variabel leluasa, sebaliknya variabel lepas merupakan jenis variabel yang menerangkan ataupun pengaruhi variabel yang lain. Variabel terbatas yang dipakai pada riset ini merupakan Indikator Pembangunan Orang (IPM). Serta buat variabel bebas yang dipakai pada riset ini merupakan Pengeluaran Mengkonsumsi Rumah tangga, Pengeluaran Mengkonsumsi Pemerintah serta Pajak Wilayah.

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator ndikator Pembangunan Manusia (HDI) mengukur kemampuan masyarakat untuk mengurangi kualitas hidup mereka di berbagai platform. LISU dihitung dari informasi yang menjelaskan empat domain periode pelatihan untuk mengukur pencapaian dalam hal pendidikan dan perolehan biasanya dalam hal pendidikan dan perolehan. Hak warga negara untuk menanggapi kebutuhan khusus yang diajukan oleh pendaki adalah biaya per kapita tergantung pada bagaimana mereka menggantikan kemajuan dalam penaklukan dengan kehidupan yang bermartabat. Skala

Kualitas Hidup HDI dikembangkan melalui pendekatan tiga dimensi lansia dan dewasa muda yang hidup secara bijaksana dan jujur.<sup>4</sup>

- b. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga untuk barang jadi dan jasa demi memuaskan keinginan produsen. Pengeluaran publik untuk makanan, pakaian, dan hal-hal lain yang mereka inginkan dianggap sebagai pengeluaran konsumsi.
- c. Pengeluaran Mengkonsumsi Pemerintah merupakan salah satu dari kebijaksanaan pajak yang sudah terbuat oleh pemerintah. Arti dari pengeluaran disini ialah berbelanja pemerintah yang dipakai buat menata jalannya perekonomian buat menaikkan keselamatan warga. Pengeluaran Pemerintah berfungsi buat mempertemukan permohonan warga dengan penyediaan alat serta infrastruktur yang tidak bisa dipadati oleh swasta.
- d. Pengeluaran pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayar anggaran rumah tangga daerah. Pajak Daerah PP No. 34 Tahun 2000. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah tanpa memandang kabupaten atau kota termasuk pajak daerah dan kabupaten atau kota

Beraneka macam tipe berita yang dikenakan pada riset ini merupakan berita inferior yang didapat dari Tubuh Pusat Statitik, internet, dan basis lain yang berkaitan dengan permasalahan riset. Informasi yang dipakai ialah informasi runtun durasi (time series) tahunan. Informasi time series merupakan suatu berkas pemantauan kepada nilai- nilai suatu variable dari sebagian rentang waktu durasi yang berlainan.

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS)

Informasi semacam ini dapat digabungkan dalam suatu istirahat rentang waktu yang regular, semacam setiap hari, mingguan, bulanan, kuartalan, tahunan, 5 tahunan, ataupun 10 tahunan. Informasi yang dipakai merupakan rentang waktu tahun 2011- 2020. Informasi yang dipakai pada riset ini antara lain:

- a. Data Informasi Indikator Pembangunan Orang (IPM) Kabupaten Tulungagung tahun 2011- 2020.
- b. Informasi pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Tulungagaung tahun 2011- 2020.
- c. Informasi pengeluaran mengkonsumsi pemerintah Kabupaten Tulungagaung tahun 2011- 2020.
- d. Informasi Pajak Wilayah Kabupaten Tulungagaung tahun 2011- 2020.

Riset ini memakai cara kuantitatif, dengan metode analisa regresi linier berganda memakai SPSS tipe 23. Analisa informasi dicoba dengan mencoba dengan cara statistik variabel dengan dorongan alat perangkat program. Analisa ini diharapkan bisa dipakai buat mengenali seberapa besar akibat aspek leluasa (independent) kepada aspek terikat (dependent). Pada Riset ini memakai 3 variabel bebas ialah, pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga, pengeluaran konsusmis pemerintah serta pajak wilayah.

Regresi linier berganda dimaksudkan buat mencoba akibat 2 ataupun lebih variabel bebas (explanatory) kepada satu variabel terbatas. Bentuk ini memperhitungkan terdapatnya ikatan satu garis lurus terbatas bersama tiap- tiap prediktornya. Ikatan ini umumnya di informasikan pada metode.<sup>5</sup> Dalam kasus ini, rumus yang terbentuk adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Di mana:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X1 = Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- X2 = Pengeluaran konsumsi pemerintah
- X3 = Pajak Daerah

Teknik analisis data regresi linier berganda dapat dilakukan dengan uji prasyarat, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

#### a. Uji Prasyarat

Pada regresi linier berganda butuh dilakukam percobaan pra ketentuan buat mengenali pertemuan regresi yang didapat betul- betul bisa dipakai buat memperhitungkan variabel terbatas.

##### 1) Uji Normalitas

Misi percobaan normalitas merupakan mau mengenali apakah penyaluran suatu informasi menjajaki ataupun mengetahui penyaluran wajar, ialah penyaluran informasi wujud bel. Informasi yang bagus merupakan informasi yang memiliki pola semacam penyaluran wajar, ialah informasi itu tidak melenceng kiri ataupun melenceng kanan (Santoso 2017: 42).

Percobaan normalitas informasi dimaksudkan buat menampilkan kalau informasi ilustrasi berawal dari populasi yang berdistribusi wajar. Pemakaian percobaan normalitas bermaksud buat memandang kenormalan penyaluran informasi pada bentuk regresi. Cara yang dipakai merupakan dengan cara percobaan Shapiro Wilk sebab jumlah informasi < 50.

Kriteria Pengujian:

- a) Angka signifikansi uji Shapiro Wilk Sig > 0,05; maka data bersirkulasi normal.
- b) Angka signifikansi uji Shapiro Wilk Sig < 0,05; maka data tidak bersirkulasi normal.

#### b. Uji Asumsi Klasik

<sup>5</sup> Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, (Semarang: ISBN, 2012), hlm. 11

Untuk mencetak bentuk regresi yang bisa dipakai, sehingga butuh dicoba pengetesan apakah terdapat tidaknya penyimpangan kepada percobaan anggapan klasik. Ada pula percobaan anggapan klasik selaku selanjutnya.

### 1) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berupa uji regresi linier apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu untuk interval waktu  $t$  dan kesalahan pengganggu untuk interval waktu  $t-1$  (pertama). komunikasi otomatis sebab pemantauan yang berentetan selama durasi berhubungan satu serupa yang lain. Permasalahan ini mencuat sebab residual (kekeliruan pengacau) tidak leluasa dari satu pemantauan ke pemantauan yang lain.<sup>6</sup> Pada riset ini, mengetahui autokorelasi dicoba dengan Run Test. Run Test selaku bagian dari statistik non- parametrik bisa dipakai buat mencoba apakah dampingi residual ada hubungan yang besar. Bawah pengumpulan ketetapan percobaan autokorelasi:

Cara pengetesan yang kerap dipakai merupakan dengan percobaan Durbin- Watson (percobaan DW) dengan determinasi selaku selanjutnya:

- a) Bila  $d$  lebih Jika  $d$  kurang dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$  menolak hipotesis  $0$  berarti ada autokorelasi.

- b) Jika  $d$  antara  $dU$  dan  $(4-dU)$  maka diperoleh hipotesis nol yang berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Jika  $d$  terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau  $(4-dL)$  dan  $(4-dU)$  tidak mengarah pada kesimpulan konklusi

### 2) Uji Multikolinearitas

Model regresi dapat diuji dengan memeriksa angka toleransi dan variance inflation factor (VIF). Kriteria keputusan konvensi setter berikutnya (Kosali 2016) mengenai uji multikolinieritas:

- a) nilai  $VIF < 10$  atau nilai toleransi  $> 010$  tidak terjadi multikolinieritas
- b) nilai  $VIF > 10$  atau nilai toleransi  $< 010$  maka ditunjukkan multikolinearitas.

### c. Uji Hipotesis

Percobaan hipotesis ialah metode yang dipakai buat mencoba bukti ataupun kekeliruan dari hasil anggapan nihil dari ilustrasi. Ilham bawah yang melatarbelakangi pengetesan signifikansi merupakan percobaan statistic (estimator) dari penyaluran ilustrasi dari satu statistik di dasar anggapan nihil. Ketetapan buat memasak terbuat bersumber pada angka percobaan statistik yang didapat dari informasi yang terdapat.<sup>7</sup>

#### 1) Uji Keterandalan Model (Uji T)

Percobaan ini dipakai buat mencoba dengan cara perseorangan apakah elastis bebas mempengaruhi penting kepada variabel terbatas..<sup>8</sup> Mencari pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut.

<sup>6</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ke-4*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2006)

<sup>7</sup> Dedy Setya Atmaja, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2017*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hlm. 47

<sup>8</sup> Anton Bawono & Arya Fendha Ibnu Shina, *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2018), hlm. 23

a) Tabel bilangan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Ini berarti bahwa variabel seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan pajak daerah memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap indeks pembangunan manusia. Ini berarti bahwa variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pajak daerah, dll memiliki dampak yang dapat diabaikan terhadap indeks pembangunan manusia.

**2) Uji Signifikansi Individu (Uji F)**

Hasil pengujian ini setelah itu dipakai buat melaksanakan percobaan hubungan dengan memakai ANOVA buat mengenali apakah bentuk regresi mempengaruhi penting kepada elastis terbatas. Pastikan elastis leluasa yang dipengaruhi elastis terikat selaku selanjutnya:

- a) Dapat  $H_0$  serta dorong  $H_a$  bila  $F < F_{\alpha}$ ; dihitung pada bagan F. Maksudnya elastis pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga, pengeluaran mengkonsumsi penguasa serta pajak wilayah tidak mempengaruhi penting kepada IPM dengan cara berbarengan.
- b) Dorong  $H_0$  serta dapat  $H_a$  bila  $F > F_{\alpha}$ ; dihitung. Maksudnya elastis pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga, pengeluaran mengkonsumsi penguasa serta pajak wilayah mempengaruhi penting kepada IPM dengan cara berbarengan.

**d. Uji Koefisien Detrminasi**

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya prosentase pengaruh variabel bebas persaingan usaha, etika bisnis islam dan religiusitas terhadap variabel tak bebas volume penjualan. Besarnya koefisien

determinasi dilihat dari nilai *R Square* yang didapat saat melakukan pengolahan data menggunakan menggunakan software SPSS.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Informasi yang dipakai pada riset ini merupakan informasi time series bersumber pada informasi dari Tubuh Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung. Buat mendefinisikan serta mencoba informasi variable terikat dipakai informasi Indikator Pembangunan Orang (IPM), serta variable leluasa dipakai informasi pengeluaran mengkonsumsi pemerintah, pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga serta pajak wilayah di Kabupaten Tulungagung rentang waktu 2011- 2020. Selanjutnya informasi penelitiannya.

**Tabel 4.1**  
**Data Penelitian**

Tahun	Pengeluaran Konsumsi RumahTangga (%)	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (%)	Pajak Daerah (%)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
	X1	X2	X3	Y
2011	6,52	12,19	143,7	67,76
2012	5,55	10,12	131,5	68,29
2013	4,31	5,54	128,01	69,3
2014	4,45	1,23	113,49	69,49
2015	3,25	5,13	115,72	70,07
2016	3,74	5,65	109,93	70,82
2017	2,88	4,23	131,9	71,24
2018	3,80	5,23	124,2	71,99
2019	2,94	3,46	111,83	72,62
2020	0,86	2,22	96,78	73,00

*Sumber: Badan Pusat Statistik Tulungagung, berbagai edisi*

Berikut ini penjelasan deskripsi data dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian:

**a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Dikutip dari Tubuh Pusat Statistik (BPS), Indikator Pembangunan Orang (IPM) bermanfaat buat mengukur capaian pembangunan orang berplatform beberapa bagian bawah mutu hidup. Selaku skala mutu hidup, IPM dibentuk melewati pendekatan 3

format bawah. Format itu melingkupi baya jauh serta segar, wawasan, serta kehidupan yang pantas. Ketiga format itu mempunyai penafsiran amat besar sebab terpaat banyak aspek. Buat mengukur format kesehatan, dipakai nilai impian hidup durasi lahir. Berikutnya buat mengukur format wawasan dipakai kombinasi penanda nilai bangun graf serta pada umumnya lama sekolah. Ada pula buat mengukur format hidup pantas dipakai penanda daya energi beli warga kepada beberapa keinginan utama yang diamati dari pada umumnya besarnya pengeluaran perkapita selaku pendekatan pemasukan yang menggantikan capaian pembangunan buat hidup pantas.<sup>9</sup> Indikator Pembangunan Orang memakai cara kalkulasi terkini, ialah mulai tahun 2010. Selanjutnya informasi indikator pembangunan orang Kabupaten Tulungagung dalam tahun 2011- 2020

**Tabel 4.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**  
**Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2020**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tulungagung (%)
2011	67.76
2012	68.29
2013	69.30
2014	69.49
2015	70.07
2016	70.82
2017	71.24
2018	71.99
2019	72.62
2020	73.00

Sumber: BPS diolah

Apabila dicermati, Pada durasi 10 tahun terakhir IPM di Kabupaten Tulungagung hadapi kenaikan yang penting ialah dari tahun 2011- 2020. Ekskalasi dengan cara penting ialah tahun 2011 tingkatan IPM 67, 76 Persen, tahun 2012 tingkatan IPM 68, 29 Persen, tahun 2013 tingkatan IPM 69, 30 Persen, tahun 2014 tingkatan IPM 69, 49 Persen, tahun 2015 tingkatan IPM 70, 07 Persen, tahun 2016 tingkatan IPM 70, 82

Persen, tahun 2017 tingkatan IPM 71, 24 Persen, tahun 2018 tingkatan IPM 71, 99 Persen, tahun 2019 tingkatan IPM 72, 62 Persen, tahun 2020 tingkatan IPM 73 Persen.<sup>10</sup>

Nampak kalau IPM di Kabupaten Tulungagung tiap tahunnya hadapi kenaikan yang lumayan penting. IPM terendah terjalin dalam tahun 2011 dengan nilai IPM 67, 76 serta tingkatan IPM paling tinggi terjalin dalam tahun 2020 dengan nilai IPM 73. Kenaikan IPM tiap tahunnya mendeskripsikan kalau mutu basis energi orang serta keselamatan warga di Kabupaten Tulungagung hadapi pergantian mengarah ke arah yang positif. Angka IPM dibidang besar bila dibanding dengan wilayah lain. Perihal itu dipengaruhi oleh sebagian aspek, ialah:

Pertama, aspek Pendidikan yang terus menjadi mencukupi. Perihal itu ditunjukkan dalam informasi Impian Lama Sekolah Kabupaten Tulungagung yang tiap tahunnya senantiasa bertambah. Melonjaknya Impian Lama Sekolah jadi tanda- tanda positif kalau terus menjadi banyak warga yang berpelajaran. Impian Lama Sekolah di Kabupaten Tulungagung sudah menggapai 13, 31 dalam tahun 2020 serta diperkirakan hendak lalu hadapi ekskalasi tiap tahunnya, yang berarti kalau kanak- kanak umur 7 tahun mempunyai kesempatan buat menamatkan sampai lolos S1 ataupun selebihnya. Perkembangan yang positif ini ialah modal berarti pada membuat mutu orang di Kabupaten Tulungagung.

Kedua, alat sanitasi (Kesehatan) yang terdapat di tiap wilayah telah komplet. Telah banyak rumah sakit serta puskesmas yang tiap- tiap mempunyai daya kedokteran yang lumayan serta berpengalaman. Provinsi wilayah mempunyai banyak sarana

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik (BPS)

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (BPS)

kesehatan serta daya kedokteran yang mencukupi serta berpengalaman. Alat Kesehatan tidak cuma berfokus dalam kota, namun telah hingga ceruk dusun, alhasil berakibat dalam penyusutan nilai kematian dampak penyakit ataupun kelahiran, sebab jumlahnya yang amat banyak serta mencukupi.

Ketiga, Pemberdayaan SDM di area Kabupaten Tulungagung diberdayakan dengan bagus dengan membagikan pelatihan- pelatihan untuk pengangguran. Meluaskan peluang kegiatan buat menampung lebih banyak daya kegiatan serta menaikkan pembangunan orang di wilayah.

**b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga**

Menurut Tubuh Pusat Statistik (BPS) pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga (PK- RT) ialah pengeluaran atas benda serta pelayanan oleh rumah tangga buat misi mengkonsumsi. Rumah tangga didefinisikan selaku orang ataupun golongan orang yang bermukim bersama pada sesuatu gedung tempat bermukim. Mereka mengakumulasi pemasukan, mempunyai harta serta peranan, dan komsumsi benda serta pelayanan dengan cara bersama- sama yang paling utama ialah santapan serta perumahan.

Menurut Sukirno tidak seluruh bisnis yang dicoba oleh rumah tangga digolongkan selaku mengkonsumsi (rumah tangga).<sup>11</sup> Aktivitas rumah tangga buat membeli rumah digolongkan selaku pemodal. Berikutnya selaku pengeluaran mereka, semacam melunasi asuransi serta mengirim uang pada orang berumur (ataupun anak yang lagi berpelajaran) tidak digolongkan

selaku mengkonsumsi sebab beliau tidak ialah pembelanjaan kepada benda ataupun pelayanan yang diperoleh pada perekonomian. Selanjutnya informasi pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga Kabupaten Tulungagung tahun 2011- 2020.<sup>12</sup>

**Tabel 4.3**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2020**

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tulungagung (%)
2011	6.52
2012	5.55
2013	4.31
2014	4.45
2015	3.25
2016	3.74
2017	2.88
2018	3.80
2019	2.94
2020	0.86

Sumber: BPS diolah

Bersumber pada informasi dari Tubuh Pusat Statistik( BPS) Kabupaten Tulungagung, dalam tahun 2011- 2020 pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga hadapi pergerakan dengan cara fuktatif ialah tahun 2011 tingkatan( PK- RT) 6, 52 Persen tahun 2012 tingkatan( PK- RT) 5, 55 Persen tahun 2013 tingkatan( PK- RT) 4, 31 Persen tahun 2014 tingkatan( PK- RT) 4, 45 Persen tahun 2015 tingkatan (PK-RT) 3, 25 Persen tahun 2016 tingkatan (PK-RT) 3, 74 Persen tahun 2017 tingkatan( PK- RT) 2, 88 Persen tahun 2018 tingkatan( PK- RT) 3, 80 Persen tahun 2019 tingkatan( PK- RT) 2, 94 Persen tahun 2020 tingkatan( PK- RT) 0, 86 Persen.<sup>13</sup>

Pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga di Kabupaten Tulungagung paling

<sup>11</sup> Jana Putri Utami, *Pengeluaran Konsumsi Pangan dan non Pangan Rumah Tangga di kota Medan dan Faktor yang Mempengaruhinya*, (Medan: Tesis Program studi Magister Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara, 2017)

<sup>12</sup> Abu bakar, "Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika" dalam <http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnalkritis/article/view/111>, diakses 10 Desember 2022

<sup>13</sup> Badan Pusat Statistik (BPS)

tinggi terjalin dalam tahun 2011 ialah sebesar 6, 52 Persen. Dari tahun 2011- 2013 pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga di kabupaten Tulungagung lalu hadapi penyusutan. Hadapi kenaikan lagi ialah dalam tahun 2014, namun kenaikan itu tidak sangat besar, ialah cuma senilai 0, 14 Persen saja dari beda dalam tahun 2014 sebesar 4, 45 Persen serta 2013 sebesar 4, 31 Persen. Setelah itu dari 2015- 2020 pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga di kabupaten Tulungagaung lalu hadapi naik turun. Penyusutan sangat akut terjalin dalam 2020 ialah sebesar 0, 86 Persen.

BPS berkata aspek pemicu melambatnya perkembangan mengkonsumsi rumah tangga karena warga menengah ke atas menahan konsumsinya. Penyusutan itu searah dengan melambatnya perkembangan pabrik santapan serta minuman. BI pula menulis kalau pelanggan mengarah menahan mengkonsumsi serta menaikkan dana. Rumah tangga bisa jadi menahan mengkonsumsi, semacam yang didikatan oleh BPS ataupun BI. Tetapi, kita sedang wajib menyambut anggapan lain, semacam penyusutan ini menunjukkan eskalasi bayaran hidup serta penyusutan angka ubah rupiah. Tidak hanya itu, eskalasi harga tidak cocok dengan eskalasi imbalan. Rendahnya perkembangan ekonomi itu salah satunya diakibatkan oleh melambatnya perkembangan mengkonsumsi rumah tangga.

**c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**

Pengeluaran Pemerintah merupakan perhitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada menaikkan keselamatan warga pertahunnya. Pengeluaran pemerintah pada riset ini merupakan besarnya berbelanja APBD Kabupaten

Tulungagung, dasar dari variabel ini merupakan%. Selanjutnya informasi pengeluaran mengkonsumsi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam tahun 2011- 2020.

**Tabel 4.4**  
**Pengeluaran Konsumsi Pemerintah**  
**Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2020**

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Kabupaten Tulungagung (%)
2011	12.19
2012	10.12
2013	5.54
2014	1.23
2015	5.13
2016	5.65
2017	4.23
2018	5.23
2019	3.46
2020	2.22

*Sumber: BPS diolah*

Bersumber pada informasi pengeluaran pemerintah kabupaten tulungagung dari tahun 2011- 2020 beranjak dengan cara labil, ialah tahun 2011 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 12, 19 Persen, tahun 2012 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 10, 12 Persen, tahun 2013 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 5, 54 Persen, tahun 2014 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 1, 23 Persen, tahun 2015 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 5, 13 Persen, tahun 2016 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 5, 65 Persen, tahun 2017 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 4, 23 Persen, tahun 2018 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 5, 23 Persen, tahun 2019 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 3, 46 Persen, tahun 2020 tingkatan Pengeluaran Pemerintah 2, 22 Persen.

Pengeluaran Mengkonsumsi Pemerintah paling tinggi terjalin dalam tahun 2011 ialah sebesar 12, 19 Persen.

Sebaliknya Pengeluaran Mengonsumsi Pemerintah terendah terjalin dalam tahun 2014 ialah sebesar 1, 23 Persen. Penyusutan mengonsumsi pemerintah itu diakibatkan oleh penyusutan berbelanja benda serta pelayanan melewati anggaran pemasukan serta berbelanja negara.

**d. Pajak Daerah**

Pajak ialah iuran orang pada negeri. Yang berkuasa memungut pajak ialah negeri, bagus melewati pemerintah pusat ataupun pemerintah wilayah. Iuran yang dibayarkan berbentuk uang, serta bukan benda. Pajak Wilayah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah wilayah serta dipakai buat mendanai rumah tangga wilayah. Pajak wilayah diatur pada PP Nomor. 34 Tahun 2000. Pajak- pajak yang dipungut oleh Pemerintah Wilayah bagus Provinsi ataupun Kabupaten atau Kota antara lain mencakup pajak Provinsi serta pajak Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ialah informasi pajak wilayah Kabupaten Tulungagung dalam tahun 2011- 2020.

**Tabel 4.5**  
**Data Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011-2020**

Tahun	Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung (%)
2011	143.70
2012	131.50
2013	128.01
2014	113.49
2015	115.72
2016	109.93
2017	131.90
2018	124.20
2019	111.83
2020	96.78

*Sumber: BPS diolah*

Bersumber pada informasi BPS, Pajak Wilayah Kabupaten Tulungagung dari tahun 2011- 2020 beranjak labil, ialah tahun 2011 Pajak Wilayah sebesar 143, 7 Persen,

tahun 2012 tingkatan Pajak Wilayah sebesar 131, 5 Persen, tahun 2013 Pajak Wilayah sebesar 128, 01 Persen, tahun 2014 tingkatan Pajak Wilayah sebesar 113, 49 Persen, tahun 2015 tingkatan Pajak Wilayah sebesar 115, 72 Persen, tahun 2016 tingkatan Pajak Wilayah sebesar 109, 93 Persen, tahun 2017 tingkatan 131, 9 Persen, tahun 2018 tingkatan 124, 2 Persen, tahun 2019 tingkatan 111, 83 Persen, tahun 2020 tingkatan Pajak Wilayah sebesar 96, 78 Persen.

Sebaliknya dari 2017- 2020 hadapi penyusutan. Kenaikan sangat besar terjalin dalam tahun 2016- 2017 ialah sebesar 21, 97 Persen, hasil itu ialah beda dari 131, 90 Persen serta 109, 93 Persen. Sebaliknya penyusutan sangat ekstrem terjalin dalam tahun 2019- 2020 ialah sebesar 15, 05 Persen. Perihal itu disebabkan terdapatnya endemi covid- 19 yang terjalin di bumi serta Pajak Wilayah di Tulungagung turut hadapi akibatnya. Pajak wilayah Kabupaten Tulungagung terendah terjalin dalam tahun 2020 ialah sebesar 96. 78 Persen, sebaliknya pajak yang paling tinggi terjalin dalam tahun 2011 ialah sebesar 143. 70 Persen.

**Hasil Analisis Data**

**1. Uji Prasyarat**

Saat sebelum melaksanakan analisa informasi, terlebih dulu hendak dicoba pengetesan prasyarat regrasi. Perihal ini berarti sebab buat mengenali metode Regresi Linier Berganda sehingga dara- data wajib penuhi syarta- syarat yang telah ditetapkan selaku selanjutnya:

**a) Uji Normalitas**

Percobaan normalitas dipakai buat memandang apakah angka residual terdistribusi wajar ataupun tidak. Hasil pengetesan normalitas informasi bisa diamati dalam output (SPSS 23) dibawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Pengujian Normalitas**

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	.969	10	.879
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	.897	10	.201
Pajak Daerah	.975	10	.936
Indeks Pembangunan Manusia	.963	10	.824

Dari hasil *output* uji normalitas pada tabel 4.6 itu, jumlah informasi sebesar 10 yang berarti kurang dari 50 alhasil memakai cara Shapiro- Wilk, di mana informasi diklaim berdistribusi wajar bila mempunyai sig. lebih dari 0, 05. Dari bagan itu membuktikan variable Pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga sig. 0. 879 > 0. 05; Pengeluaran mengkonsumsi pemerintah sig. 0. 201 > 0.05; Pajak Wilayah sig. 0. 936 > 0. 05; IPM sig. 0. 824 > 0. 05, alhasil bisa dibidang kalau informasi berdistribusi wajar.

**2. Uji Asumsi Klasik**

Untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan, maka perlu dilakukan pengujian apakah ada tidaknya penyimpangan terhadap uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik sebagai berikut:

**a. Uji Autokorelasi**

Percobaan autokolerasi dipakai buat mengenali terdapat tidaknya penyimpangan anggapan klasik autokolerasi yang terjalin antara residual pasa satu observasi dengan observasi yang lain dalam bentuk regresi.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.892 <sup>a</sup>	.796	.694	.98702	1.462

Dari hasil output percobaan autokorelasi dalam table 4. 7 di atas membuktikan angka Durbin- Watson (d) merupakan sebesar 1, 462. Angka ini dibanding dengan angka bagan durbin watson dalam signifikansi 5 Persen dengan metode (k'; N). k merupakan jumlah variabel bebas merupakan 3 ataupun k=3, sedangkan jumlah ilustrasi ataupun N=10, sehingga (k'; N) = (3; 10). Bersumber pada bagan Penyaluran Durbin Watson, dengan (k'; N) = (3; 10) diperoleh angka dL= 0, 5253 serta dU= 2, 0163, sebaliknya angka Durbin-Watson (d) bentuk regresi merupakan sebesar 1, 462.

Berarti angka Durbin Watson (d) regresi ada di antara angka dL serta dU ataupun dL< d< dU (0, 5253< 1, 462< 2, 0163). Bersumber pada pengumpulan ketetapan pada percobaan durbin watson, bila angka d (durbin watson) terdapat antara dL serta dU ataupun diantara (4-dU) serta( 4- dL), sehingga tidak membuahkan kesimpulan yang tentu. Buat itu bisa pula diklaim kalau tidak terjalin permasalahan autokorelasi.

**b. Uji Multikolinearitas**

Percobaan multikolinieriatas bermaksud buat mengenali apakah bentuk regresi ditemui terdapatnya hubungan antara variable leluasa (independent). Patokan buat memandang apakah terdapat hubungan dampingi variabel merupakan dengan memandang

tolerance ataupun variance inflation factor (VIF).

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	.303	3.304
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	.336	2.973
Pajak Daerah	.311	3.211

Dari hasil output uji multikolinearitas pada table 4.8 di atas menunjukkan nilai VIF dan tolerance masing-masing variable sebagai berikut:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga VIF  $3,304 < 10$  atau nilai *Tolerance*  $0,303 > 0,10$ .
- b) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah nilai VIF  $2,973 < 10$  atau nilai *Tolerance*  $0,336 > 0,10$ .
- c) Pajak daerah nilai VIF  $3,211 < 10$  atau nilai *Tolerance*  $0,311 > 0,10$

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji t**

Model	t	Sig.
(Constant)	17.602	.000
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	-2.617	
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-.138	.895
Pajak Daerah	.075	.943

Dari hasil output uji t pada table 4.9 di atas menunjukkan nilai signifikansi dan t hitung masing-masing variable. Dengan t tabel sebesar  $(0.5/2; n-k-1) = t(0,025; 6) = 2,447$ , maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) H1 Sig.  $0,000 < 0,05$  dan t hitung  $17,602 > 2,447$  t tabel artinya H1 artinya IPM berpengaruh besar terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga
- 2) H2 Sig.  $0.895 > 0.05$  dan yang kita hitung adalah  $0,138 < 2,447$  reject. Tidak terdapat pengaruh signifikan konsumsi pemerintah daerah terhadap IPM.
- 3) H3 sig.  $0.943 > 0.05$  dan yang kita hitung adalah  $0,075 < 2,447$  reject. Tidak terdapat pengaruh signifikan pajak daerah terhadap IPM.

#### b. Uji simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variable independent yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji F**

Model	F	Sig.
Regression	7.797	.017 <sup>b</sup>
Residual		
Total		

Dari hasil output uji f pada table 4.10 di atas menunjukkan nilai signifikansi

dan  $f$  hitung. Dengan  $f$  tabel sebesar  $f(k; n-k) = f(3; 7) = 4,35$  dan Nilai sig.  $0,017 < 0,05$  serta  $f$  hitung  $7,797 > 4,35$   $f$  tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pajak daerah terhadap IPM.

#### 4. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independent (bebas) secara individual menjelaskan variabel terikat (dependen).

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	74.058	4.207
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	-1.009	.385
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-.023	.169
Pajak Daerah	.003	.043

Dari output uji regresi linear berganda pada tabel 4.11 tersebut, maka didapat hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  
 $74,058 - 1,009 X_1 - 0,03 X_2 + 0,003 X_3 + e$

#### 5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independent menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square
1	.892 <sup>a</sup>	.796

Dari hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.7 di atas, diketahui nilai koefisien determinasi (RSquare) sebesar 0,796. Besarnya angka koefisien determinasi (RSquare) sama dengan 79,6%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia berpengaruh secara simultan sebesar 79,6%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

#### **Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2020**

Mengkonsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif serta penting kepada Indikator Pembangunan Orang. Perihal ini disebabkan kenaikan pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga diiringi pula oleh kenaikan indikator pembangunan orang di Kabupaten Tulungagung. Mengkonsumsi warga searah dengan pendapatannya. Bila pemasukan seseorang besar, sehingga hendak terus menjadi besar pula pengeluaran konsumsinya. Jadi telah nyata kalau mengkonsumsi dipengaruhi oleh pendapatannya. Tingkatan pemasukan yang besar hendak menaikkan keselamatan warga. Ekskalasi pemasukan hendak meningkatkan pula angka indikator pembangunan orang (IPM), sebab pemasukan merupakan salah satu penanda pada kalkulasi Indikator Pembangunan Orang (IPM).

Pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga ialah salah satu patokan pada tingkatan keselamatan warga. Semacam filosofi Keynes kalau terus menjadi besar

pengeluaran warga buat mengkonsumsi, sehingga terus menjadi besar pula pemasukan serta keselamatan warga itu. Mengkonsumsi pula membagikan cerminan dari tingkatan kelimpahan, dimana terus menjadi besar tingkatan mengkonsumsi sehingga terus menjadi besar pula tingkatan kelimpahan warga itu, kebalikannya terus menjadi kecil tingkatan mengkonsumsi sehingga terus menjadi kecil pula kelimpahan masyarakat itu.

Riset ini searah dengan riset yang dicoba oleh Abu Bakar (2020) yang bertajuk “Analisa Akibat Mengkonsumsi Rumah Tangga serta Pengeluaran Pemerintah kepada Indikator Pembangunan Orang Kabupaten Mimika”. Bersumber pada hasil riset itu pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga mempunyai angka  $19,838 > 2,02$ , yang maksudnya pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga mempengaruhi dengan cara penting kepada indikator pembangunan orang di Kabupaten Mimika.

Hasil Riset ini tidak searah dengan riset yang dicoba Padli, Hailuddin serta Wahyudi (2019) yang bertajuk “Akibat Pengeluaran Rumah Tangga, Pemodal Swasta serta Berbelanja Langsung Pemerintah Wilayah kepada Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001-2017”. Bersumber pada hasil riset membuktikan pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga tidak mempengaruhi penting dengan angka koefisien regresi mengkonsumsi rumah tangga merupakan 0.008278 dengan angka t jumlah sebesar 0.338767 yang berarti kalau pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga tidak mempengaruhi penting kepada perkembangan ekonomi.

### **Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2020**

Pengeluaran mengkonsumsi pemerintah tidak mempengaruhi penting kepada indikator pembangunan orang (IPM) di Kabupaten Tulungagung. Perihal ini disebabkan kedudukan pemerintah pada sediakan alat serta infrastruktur permohonan warga belum maksimum. Serta akibat dari sumber- sumber pendapatan negeri semacam pajak yang dipungut dari warga pula belum diperoleh dengan dengan cara maksimum.

Upaya pemerintah pada penuhi keinginan warga mempunyai ikatan dengan Indikator Pembangunan Orang (IPM), bila terus menjadi besar pengeluaran pemerintah, sehingga terus menjadi besar pula tingkatan keselamatan yang dialami warga.

Riset ini searah dengan riset yang dicoba oleh Jehuda Jean Sanny Mongan (2019) yang bertajuk “Akibat Pengeluaran Pemerintah Aspek Pendidikan Serta Kesehatan kepada Indikator Pembangunan Orang di Indonesia”. Bersumber pada hasil riset itu pengeluaran mengkonsumsi pemerintah mempunyai angka  $1,43 > 1$ , yang maksudnya pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga tidak mempengaruhi dengan cara penting kepada indikator pembangunan orang.

### **Pengaruh Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulungagung tahun 2011-2020**

Pajak Wilayah tidak mempengaruhi penting kepada indikator pembangunan orang (IPM) di Kabupaten Tulungagung. Perihal ini diprediksi diakibatkan sebab banyaknya halangan yang di hadapi pemerintah

wilayah terpaut dengan usaha pendapatan realisasi pajak wilayah antara lain merupakan jasa yang kurang mencukupi kepada harus pajak. Tidak hanya itu, sedang banyak warga yang tidak patuh pada melunasi pajak tetapi tidak terdapat ganjaran yang jelas. Alhasil anggaran pajak dari warga yang seharusnya masuk untuk pembagian penerapan pembangunan jadi tertahan.

Riset ini searah dengan riset yang dicoba oleh Wenny Widiyanti (2016) yang bertajuk “Akibat Masyarakat Miskin, Pajak Wilayah, Pengeluaran Pemerintah Aspek Pendidikan Serta Kesehatan Dan Keseluruhan Berbelanja kepada Indikator Pembangunan Orang Di Provinsi Sulawesi Tengah”. Bersumber pada hasil riset itu pajak wilayah mempunyai angka kebolehhadiah sebesar 0.1398. Variabel Pajak Wilayah mempunyai koefisien sebesar -0.0000367. Dengan sedemikian itu dibidang Pajak Wilayah tidak mempengaruhi dalam Indikator Pembangunan Orang di Kabupaten atau Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tanggung tahun 2011-2020**

Pengeluaran mengkonsumsi rumahtangga, pengeluaran pemerintah serta pajak wilayah dengan cara simultan mempengaruhi kepada indikator pembangunan orang di Kabupaten Tanggung tahun 2011- 2020. Perihal ini dipengaruhi oleh banyak aspek, faktor- faktor itu membuktikan kalau keselamatan di Kabupaten Tanggung berkembang positif tiap tahunnya bisa mendesak warga. Pengeluaran mengkonsumsi berubungan dengan

pemasukan masyarakatnya, bila pemasukan warga bertambah sehingga tingkatan mengkonsumsi hendak bertambah pula, bila pemasukan warga naik naik sehingga tingkatan keselamatan masyarakat hendak bertambah pula. Pajak pula mempengaruhi dengan cara simultan kepada IPM, perihal ini disebabkan bila pendapatan negeri (yang salah satunya berawal dari pajak) bertambah, sehingga pengeluaran pemerintah hendak bertambah pula, serta bila pengeluaran pemerintah bertambah keselamatan warga hendak turut bertambah.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Bersumber pada hasil riset yang sudah dicoba mengenai akibat pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah serta pajak wilayah kepada indikator pembangunan orang di Kabupaten Tanggung tahun 2011- 2020, bisa disimpulkan kalau:

1. Pengeluaran mengkonsumsi rumah tangga berpengaruh penting kepada indikator pembangunan orang, perihal ini sebab mengkonsumsi berkaitan dengan pemasukan, bila pemasukan bertambah sehingga tingkatan pembangunan orang hendak bertambah pula
2. Pengeluaran mengkonsumsi pemerintah tidak mempengaruhi penting kepada indikator pembangunan orang, sebab kedudukan pemerintah pada sediakan alat serta infrastruktur permohonan warga belum maksimum.
3. Pajak wilayah tidak mempengaruhi penting kepada indikator pembangunan orang, sebab sedang banyak warga yang tidak patuh pada melunasi pajak tetapi tidak terdapat ganjaran yang jelas. Alhasil anggaran pajak dari warga yang seharusnya masuk untuk pembagian penerapan pembangunan jadi tertahan.

## Saran

Bersumber pada kesimpulan diatas sehingga anjuran yang bisa diserahkan dari hasil riset ini selaku selanjutnya:

1. Pemerintah wajib dapat lebih membagikan pengeluaran pemerintah buat perihal yang lebih mempengaruhi terhdap keselamatan warga.
2. Pemerintah wajib lebih jelas kepada warga biar harus pajak melunasi pajak dengan teratur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010-2021. *Indeks Pembangunan Manusia*. Tulungagung.
- Bakar, Abu. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika" (<http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal/kritis/article/view/111>), diakses 10 Desember 2022.
- Bawono, Anton. & Fendha Ibnu Shina, Arya. 2018. *Ekonometrika Terapan Untuk Ekonomi dan Bisnis Islam Aplikasi dengan Eviews*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Damayanti, Siska. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2017*. Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi Ke-4*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Jean S. M, Jehuda. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia", (<https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/122>), diakses 14 Desember 2022.
- Jhingan. 2013. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Layadi, Budianto. "Pengaruh Pajak terhadap Perekonomian". ([https://www.academia.edu/35743586/PENGARUH\\_PAJAK\\_TERHADAP PE REKONOMIAN SUATU NEGARA](https://www.academia.edu/35743586/PENGARUH_PAJAK_TERHADAP_PE_REKONOMIAN_SUATU_NEGARA)).
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2014. *Ekonomi Publik Edisi ketiga BPF*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muljono, Djoko. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nirmala Arum Janie, Dyah. 2012. *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: ISBN.
- Noviansyah, Helmi. dkk., "Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Dalam Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kalimantan Barat", (<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/28580>), diakses 30 November 2022.
- Oates, Wallace E, 1993, Fiscal Federalism and Economic Development, National tax Journal 46 (3), Pressman, Steven, 2004, Lima Puluh Pemiki.
- Padli, dkk. 2019. "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Swasta Dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001-2017". Mataram: (<https://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jiak/article/view/356>), diakses 11 Desember 2022.
- Putri Utami, Jana. 2017. *Pengeluaran Konsumsi Pangan dan non Pangan Rumah Tangga di kota Medan dan Faktor yang Mempengaruhinya*. Medan: Tesis Program studi Magister Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara.
- Setya Atmaja, Dedy. 2019. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan*

*Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2017*. Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan.

- Sukirno. 2005. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Kenyesian Baru*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Supramono. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teddy Chandra, Priyono. 2016. *Esensi Ekonomi Makro*. Surabaya: Zifatama.
- Todaro, P. Michael. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Widiyanti, Wenny. 2016. “Pengaruh Penduduk Miskin, Pajak Daerah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Serta Total Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Tengah Periode Tahun 2010-2014”, (<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/12068>), diakses 15 Desember 2022.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.